



Strategi Kebijakan Hilirisasi Komoditas Kopi di Provinsi Bengkulu dalam Rangka Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Daerah

Oki Sumbogo

Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bengkulu, Indonesia
Email: okisumbogo@gmail.com

Keywords:

coffee downstreaming;
value chain;
regional competitiveness;
industrial cluster;
public policy

Abstract

This research aims to analyze policy strategies for coffee commodity downstreaming in Bengkulu Province to enhance value-added and regional competitiveness. The study is motivated by the dominance of raw coffee (green bean) marketing, which results in low local value capture. This research employs a descriptive qualitative policy analysis approach using value chain theory, Porter's competitiveness framework, and policy evaluation based on the Dunn method. The findings indicate that Bengkulu's coffee value chain is still concentrated in upstream activities, while downstream processes such as processing, packaging, and branding remain underdeveloped. This condition leads to value leakage and weak competitiveness in both national and international markets. The evaluation of policy alternatives reveals that the development of an integrated coffee industry cluster is the most effective strategy, as it enhances processing capacity, strengthens inter-actor linkages, and distributes value-added more equitably. The study concludes that coffee downstreaming through an integrated industrial cluster approach is essential for promoting regional economic transformation based on value-added activities. Supported by institutional strengthening, collaborative financing, and branding development, this strategy is expected to improve farmers' welfare and enhance the competitiveness of Bengkulu coffee sustainably.

Kata Kunci:

hilirisasi kopi;
rantai nilai;
daya saing daerah;
klaster industri;
kebijakan publik

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi kebijakan hilirisasi komoditas kopi di Provinsi Bengkulu dalam rangka meningkatkan nilai tambah dan daya saing daerah. Latar belakang penelitian didasarkan pada masih dominannya pemasaran kopi dalam bentuk bahan mentah (*green bean*) yang menyebabkan rendahnya nilai tambah yang dinikmati oleh masyarakat lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan secara deskriptif kualitatif dengan memanfaatkan teori rantai nilai, daya saing Porter, serta evaluasi kebijakan menggunakan metode William N. Dunn. Hasil analisis menunjukkan bahwa struktur rantai nilai kopi Bengkulu masih terfokus pada sektor hulu, sementara aktivitas hilir seperti pengolahan, pengemasan, dan branding masih terbatas. Kondisi ini menyebabkan kebocoran nilai tambah dan rendahnya daya saing produk di pasar nasional maupun internasional. Evaluasi alternatif kebijakan menunjukkan bahwa pengembangan klaster industri kopi terintegrasi merupakan strategi paling efektif, karena mampu meningkatkan kapasitas pengolahan, memperkuat keterkaitan antar pelaku, serta menciptakan nilai tambah secara lebih merata. Kesimpulan penelitian ini menegaskan bahwa hilirisasi kopi melalui pendekatan klaster industri yang terintegrasi menjadi kunci dalam mendorong transformasi ekonomi daerah berbasis nilai tambah. Implementasi kebijakan yang didukung oleh penguatan kelembagaan, pembiayaan kolaboratif, dan pengembangan branding diyakini mampu meningkatkan kesejahteraan petani serta daya saing kopi Bengkulu secara berkelanjutan.

PENDAHULUAN

Provinsi Bengkulu merupakan salah satu daerah penghasil kopi robusta yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional. Komoditas kopi telah lama menjadi sumber penghidupan utama masyarakat, khususnya di wilayah dataran tinggi seperti Kabupaten Rejang Lebong, Kepahiang, Lebong, dan sebagian Bengkulu Utara (D. P. P. Bengkulu, 2024; Nasional, 2021). Struktur sosial-ekonomi masyarakat di wilayah tersebut sangat bergantung pada sektor perkebunan, dengan kopi sebagai komoditas unggulan yang menopang pendapatan rumah tangga petani (Dunn, 2018; Gereffi et al., 2005).

Berdasarkan data Statistik Kopi Indonesia tahun 2023 yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS), Provinsi Bengkulu menempati posisi sebagai penghasil kopi terbesar ke-5 di Indonesia, dengan produksi mencapai sekitar 55 ribu ton atau sekitar 7,23% dari total produksi nasional (B. P. S. P. Bengkulu, 2023). Luas areal tanaman kopi di Bengkulu mencapai sekitar 90 ribu hektare dengan jumlah petani yang terlibat mencapai hampir 67 ribu orang, yang menunjukkan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap komoditas ini (Humphrey & Schmitz, 2002; Indonesia, 2023; Minten et al., 2019).

Meskipun memiliki potensi yang besar, produktivitas kopi Bengkulu relatif masih rendah dibandingkan daerah penghasil utama lainnya seperti Lampung dan Sumatera Selatan (*Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Tentang RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029*, n.d.; Vicol et al., 2018). Produktivitas rata-rata sekitar 0,7 ton per hektare per tahun menunjukkan adanya kesenjangan dalam penerapan teknologi budidaya, kualitas bibit, serta praktik pascapanen. Kondisi ini mengindikasikan bahwa peningkatan produksi dan kualitas masih memiliki ruang yang cukup besar untuk dikembangkan (Ola & Menapace, 2020a, 2020b; Swinnen & Kuijpers, 2019; Tabe-Ojong et al., 2024).

Selain itu, struktur perekonomian daerah menunjukkan bahwa sektor pertanian masih menjadi kontributor utama terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), dengan kontribusi berkisar antara 28–30%, di mana subsektor perkebunan menjadi salah satu penyumbang terbesar (Minten et al., 2018; van Rijsbergen et al., 2016; Vellema et al., 2015). Namun demikian, kontribusi tersebut masih didominasi oleh aktivitas produksi primer, sementara aktivitas hilir seperti pengolahan dan industri turunan masih relatif terbatas.

Permasalahan utama yang dihadapi dalam pengembangan komoditas kopi di Provinsi Bengkulu adalah masih dominannya pola pemasaran dalam bentuk bahan mentah (green bean). Sebagian besar kopi dijual tanpa melalui proses pengolahan lanjutan seperti roasting, grinding, maupun pengemasan modern (Bravo-Monroy et al., 2016; Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, 2025; Jurjonas et al., 2016). Hal ini menyebabkan rantai nilai kopi menjadi panjang dan tidak efisien, di mana sebagian besar nilai tambah justru dinikmati oleh pelaku usaha di luar daerah yang memiliki kapasitas industri pengolahan, branding, dan akses pasar yang lebih baik.

Dari perspektif ekonomi regional, kondisi ini menyebabkan terjadinya “kebocoran nilai tambah” di mana potensi ekonomi yang seharusnya dapat dinikmati oleh masyarakat lokal justru berpindah ke daerah lain. Dampaknya, pendapatan petani kopi cenderung stagnan dan sangat rentan terhadap fluktuasi harga komoditas global. Ketergantungan terhadap pasar bahan mentah juga menyebabkan posisi tawar petani menjadi lemah dalam rantai nilai.

Di sisi lain, tren pasar kopi global dan domestik menunjukkan perkembangan yang sangat

positif, terutama pada segmen specialty coffee, kopi premium, dan produk turunan seperti kopi kemasan siap saji. Permintaan terhadap produk kopi olahan dengan kualitas tinggi dan identitas geografis yang kuat terus meningkat. Hal ini membuka peluang besar bagi daerah penghasil kopi, termasuk Bengkulu, untuk meningkatkan nilai tambah melalui pengembangan industri hilir.

Dalam kerangka pembangunan daerah, Pemerintah Provinsi Bengkulu telah menetapkan transformasi ekonomi berbasis nilai tambah sebagai salah satu agenda utama dalam RPJMD Tahun 2025–2029. Hilirisasi komoditas unggulan, termasuk kopi, menjadi strategi penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hilirisasi tidak hanya mencakup aspek pengolahan fisik, tetapi juga mencakup penguatan rantai pasok, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, pengembangan inovasi produk, serta perluasan akses pasar.

Namun demikian, implementasi hilirisasi kopi di Provinsi Bengkulu masih menghadapi berbagai kendala struktural. Industri pengolahan kopi skala menengah dan besar masih sangat terbatas, sementara sebagian besar pelaku usaha berada pada skala mikro dan kecil dengan keterbatasan modal, teknologi, dan kapasitas manajerial. Selain itu, akses terhadap pembiayaan formal masih rendah, dan dukungan infrastruktur pendukung seperti fasilitas pengolahan bersama dan logistik belum memadai.

Dari sisi kelembagaan, koordinasi antar perangkat daerah dalam mendukung hilirisasi juga belum optimal. Program-program yang ada masih cenderung sektoral dan belum terintegrasi dalam satu kerangka kebijakan yang komprehensif. Kondisi ini menyebabkan upaya hilirisasi berjalan secara parsial dan belum mampu memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan nilai tambah.

Selain itu, tantangan lain yang dihadapi adalah belum kuatnya branding kopi Bengkulu di pasar nasional maupun internasional. Berbeda dengan daerah lain seperti Gayo atau Toraja yang telah memiliki identitas kuat, kopi Bengkulu masih relatif kurang dikenal, sehingga daya saingnya di pasar premium masih terbatas.

Berdasarkan kondisi tersebut, terdapat kesenjangan yang cukup besar antara potensi komoditas kopi sebagai unggulan daerah dengan kontribusinya terhadap peningkatan nilai tambah dan daya saing ekonomi. Tanpa intervensi kebijakan yang terarah, komoditas kopi Bengkulu akan tetap berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah dengan nilai ekonomi yang relatif rendah.

Oleh karena itu, diperlukan suatu kajian kebijakan yang komprehensif dan berbasis data untuk merumuskan strategi hilirisasi komoditas kopi di Provinsi Bengkulu. Strategi tersebut diharapkan mampu meningkatkan nilai tambah, memperkuat daya saing daerah, serta mendorong peningkatan kesejahteraan petani secara berkelanjutan.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan utama dalam penelitian kebijakan ini yaitu Belum optimalnya hilirisasi komoditas kopi di Provinsi Bengkulu yang menyebabkan rendahnya nilai tambah dan daya saing daerah. Permasalahan ini tercermin dari masih dominannya pemasaran kopi dalam bentuk bahan mentah, terbatasnya kapasitas pengolahan di tingkat lokal, lemahnya integrasi antar pelaku dalam rantai nilai, serta belum kuatnya branding kopi Bengkulu di pasar nasional maupun internasional. Oleh karena itu, penelitian kebijakan ini diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama, yaitu bagaimana kondisi eksisting rantai nilai komoditas kopi di Provinsi Bengkulu, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan belum optimalnya hilirisasi kopi di

daerah, serta strategi kebijakan apa yang paling efektif untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing kopi Bengkulu. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kondisi pengembangan komoditas kopi di Provinsi Bengkulu, mengidentifikasi akar permasalahan hilirisasi kopi, dan merumuskan strategi kebijakan yang tepat untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing daerah. Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan masukan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan hilirisasi kopi, serta menjadi referensi bagi pelaku usaha dan pemangku kepentingan dalam mendukung pengembangan kopi Bengkulu secara berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Perumusan Alternatif Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, permasalahan utama yang harus dijawab adalah belum optimalnya hilirisasi komoditas kopi di Provinsi Bengkulu sehingga nilai tambah dan daya saing daerah masih rendah. Untuk menjawab permasalahan tersebut, dirumuskan beberapa alternatif kebijakan yang realistis dalam konteks kewenangan Pemerintah Provinsi Bengkulu serta mempertimbangkan kapasitas fiskal dan kelembagaan daerah.

1. Penguatan Industri Pengolahan Kopi melalui Insentif Fiskal dan Kemudahan Investasi

Alternatif pertama berorientasi pada percepatan industrialisasi kopi melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif. Pemerintah daerah memberikan insentif fiskal berupa keringanan pajak daerah, kemudahan perizinan, serta dukungan penyediaan lahan pada kawasan tertentu untuk industri pengolahan kopi. Kebijakan ini diharapkan mampu menarik investor membangun fasilitas roasting dan pengolahan lanjutan di Bengkulu sehingga sebagian besar nilai tambah tidak lagi keluar dari daerah. Namun demikian, pendekatan ini cenderung membutuhkan dukungan fiskal cukup besar serta berisiko kurang inklusif apabila tidak melibatkan pelaku usaha lokal secara signifikan.

2. Pengembangan Klaster Industri Kopi Terintegrasi di Sentra Produksi

Alternatif kedua menggunakan pendekatan klaster industri berbasis wilayah sentra kopi seperti Rejang Lebong dan Kepahiang. Model klaster mengintegrasikan petani, koperasi, UMKM pengolahan, lembaga pembiayaan, dan pemerintah daerah dalam satu ekosistem ekonomi yang saling mendukung.

Kebijakan meliputi pembangunan rumah produksi bersama, pengadaan peralatan roasting kolektif, pelatihan manajemen usaha, sertifikasi mutu, serta penguatan pemasaran terpadu. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan kapasitas pengolahan, tetapi juga memperkuat keterkaitan antar pelaku dalam rantai nilai kopi. Alternatif ini dinilai lebih inklusif karena manfaatnya langsung dirasakan oleh petani dan UMKM lokal. Tantangannya terletak pada kebutuhan koordinasi lintas perangkat daerah dan pendampingan berkelanjutan.

3. Strategi Branding dan Sertifikasi Kopi Bengkulu Berbasis Indikasi Geografis

Alternatif ketiga berfokus pada peningkatan daya saing melalui diferensiasi produk dan penguatan identitas kopi Bengkulu di pasar. Instrumen kebijakan mencakup percepatan sertifikasi Indikasi Geografis, standarisasi mutu, promosi terpadu, serta penguatan narasi produk berbasis keunikan lokal. Pendekatan ini relatif lebih ringan dari sisi investasi fisik, namun keberhasilannya sangat bergantung pada konsistensi kualitas dan kapasitas produksi hilir yang memadai.

Evaluasi Alternatif Menggunakan Metode Dunn

Penilaian alternatif dilakukan menggunakan enam kriteria evaluasi kebijakan menurut William N. Dunn, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan kelayakan. Penilaian menggunakan skala 1–5.

Tabel 1. Evaluasi Alternatif Kebijakan

Kriteria	Alt 1: Insentif Industri	Alt 2: Klaster Terintegrasi	Alt 3: Branding & IG
Efektivitas	4	5	3
Efisiensi	3	4	4
Kecukupan	3	5	3
Pemerataan	2	5	3
Responsivitas	3	5	4
Kelayakan	3	4	4
Total Skor	18	28	21

Sumber: Hasil olahan penulis berdasarkan metode evaluasi kebijakan William N. Dunn, 2026

Hasil evaluasi menunjukkan bahwa Alternatif 2 memperoleh skor tertinggi, sehingga secara analitis dinilai paling komprehensif dalam menjawab permasalahan hilirisasi kopi di Provinsi Bengkulu.

Analisis Risiko Kebijakan

Untuk memastikan implementasi berjalan efektif, dilakukan analisis risiko terhadap alternatif terpilih.

Tabel 2. Matriks Analisis Risiko

Risiko	Probabilitas	Dampak	Tingkat Risiko	Mitigasi
Koordinasi antar OPD lemah	Sedang	Tinggi	Tinggi	Pembentukan Tim Koordinasi melalui SK Gubernur
Keterbatasan anggaran	Tinggi	Tinggi	Tinggi	Skema pembiayaan kolaboratif (DAK, CSR, KUR)
Kapasitas UMKM rendah	Tinggi	Sedang	Tinggi	Pelatihan dan pendampingan berkelanjutan
Fluktuasi harga global	Sedang	Sedang	Sedang	Diversifikasi pasar domestik premium
Resistensi pelaku usaha	Rendah	Sedang	Rendah–Sedang	Sosialisasi dan insentif partisipasi

Sumber: Hasil analisis penulis, 2026

Analisis menunjukkan bahwa risiko utama bersifat administratif dan fiskal, bukan struktural, sehingga masih dapat dimitigasi melalui desain kebijakan yang adaptif.

Analisis Dampak Fiskal

Implementasi kebijakan klaster membutuhkan dukungan anggaran, namun masih dalam kategori moderat terhadap kapasitas fiskal daerah.

Tabel 3. Estimasi Kebutuhan Anggaran Tahunan

Komponen	Estimasi (Rp Miliar)
Rumah produksi bersama	8–10
Mesin pengolahan	3–5
Pelatihan & sertifikasi	1–2
Promosi & branding	1
Manajemen & pendampingan	1–2
Total	14–20 Miliar/Tahun

Sumber: Perhitungan penulis berdasarkan asumsi kebutuhan program, 2026

Jika dibandingkan dengan total belanja daerah, kebutuhan ini relatif kecil dan dapat dibiayai melalui kombinasi APBD, Dana Alokasi Khusus, dana dekonsentrasi, KUR, serta CSR.

Dalam jangka menengah, peningkatan aktivitas industri pengolahan berpotensi meningkatkan penerimaan daerah serta menciptakan multiplier effect ekonomi.

Roadmap Implementasi 5 Tahun

Roadmap implementasi kebijakan hilirisasi kopi di Provinsi Bengkulu disusun selaras dengan periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029, dengan pendekatan bertahap dan sistematis. Pada tahun 2025, fokus diarahkan pada fase regulasi dan persiapan, yang mencakup penyusunan Peraturan Gubernur sebagai dasar hukum pelaksanaan kebijakan, penetapan lokasi pengembangan klaster industri kopi, serta pembentukan tim koordinasi lintas perangkat daerah guna memastikan sinergi program.

Selanjutnya, pada tahun 2026, memasuki fase pembangunan infrastruktur, pemerintah daerah mulai melakukan pembangunan rumah produksi bersama sebagai pusat pengolahan kopi, pengadaan peralatan roasting dan pengolahan, serta pelaksanaan pelatihan manajemen usaha bagi pelaku UMKM. Tahapan ini menjadi fondasi penting dalam mendukung proses hilirisasi secara fisik dan kelembagaan.

Pada tahun 2027, kebijakan difokuskan pada fase penguatan kualitas, melalui fasilitasi sertifikasi halal, Standar Nasional Indonesia (SNI), serta Indikasi Geografis (IG). Selain itu, dilakukan penguatan kemitraan antara petani dan pelaku UMKM untuk memastikan kesinambungan pasokan bahan baku dan kualitas produk. Tahapan ini bertujuan untuk meningkatkan daya saing produk kopi Bengkulu di pasar yang lebih luas.

Memasuki tahun 2028, strategi diarahkan pada fase ekspansi pasar, dengan fokus pada penguatan branding “Kopi Bengkulu” sebagai identitas produk unggulan daerah. Promosi dilakukan secara terpadu melalui berbagai saluran, baik di tingkat nasional maupun internasional, termasuk pemanfaatan platform digital dan partisipasi dalam event pameran.

Pada tahun 2029, dilakukan fase evaluasi dan replikasi, yang mencakup evaluasi menyeluruh terhadap dampak ekonomi kebijakan yang telah diimplementasikan, serta replikasi model klaster industri kopi ke wilayah lain di Provinsi Bengkulu. Tahapan ini bertujuan untuk memastikan keberlanjutan program serta memperluas manfaat kebijakan secara lebih merata.

Alternatif Terpilih

Berdasarkan evaluasi kuantitatif, analisis risiko, dan pertimbangan fiskal, maka alternatif kebijakan yang dipilih adalah pengembangan klaster industri kopi terintegrasi di sentra produksi sebagai strategi utama hilirisasi komoditas kopi di Provinsi Bengkulu. Alternatif ini dinilai paling efektif, inklusif, dan feasible untuk meningkatkan nilai tambah serta daya saing daerah secara berkelanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hilirisasi sebagai Strategi Transformasi Ekonomi Daerah

Hilirisasi dalam perspektif pembangunan ekonomi merupakan strategi transformasi struktural yang bertujuan untuk meningkatkan kompleksitas dan kualitas ekonomi suatu wilayah melalui pengembangan aktivitas pengolahan serta industri turunan dari komoditas primer. Dalam teori pembangunan struktural, sebagaimana dikemukakan oleh W. Arthur Lewis dan diperkuat oleh pendekatan modern seperti yang disampaikan oleh Michael E. Porter, perekonomian yang bertumpu pada sektor primer cenderung memiliki produktivitas rendah, nilai tambah terbatas, serta rentan terhadap fluktuasi harga global. Sebaliknya, negara atau daerah yang mampu mengembangkan sektor sekunder dan tersier akan memiliki struktur ekonomi yang lebih kuat, berdaya saing tinggi, serta mampu menciptakan kesejahteraan yang lebih merata.

Transformasi ekonomi melalui hilirisasi menjadi semakin relevan dalam konteks pembangunan daerah di Indonesia, khususnya pada wilayah yang memiliki basis komoditas unggulan seperti Provinsi Bengkulu. Hilirisasi tidak hanya dimaknai sebagai proses pengolahan fisik dari bahan mentah menjadi produk setengah jadi atau jadi, tetapi juga mencakup proses peningkatan nilai tambah melalui inovasi produk, penguatan rantai pasok, pengembangan branding, serta ekspansi pasar. Dengan demikian, hilirisasi merupakan pendekatan yang komprehensif dalam menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih produktif dan berkelanjutan.

Dalam konteks komoditas kopi di Provinsi Bengkulu, struktur ekonomi daerah masih menunjukkan ketergantungan yang cukup tinggi pada aktivitas produksi primer. Sebagian besar kopi yang dihasilkan petani masih dipasarkan dalam bentuk biji kering (green bean), tanpa melalui proses pengolahan lanjutan di dalam daerah. Kondisi ini menyebabkan sebagian besar nilai tambah ekonomi tidak dinikmati oleh pelaku usaha lokal, melainkan berpindah ke daerah lain yang memiliki kapasitas industri pengolahan, pengemasan, serta akses pasar yang lebih maju.

Dari perspektif ekonomi regional, kondisi tersebut mengindikasikan adanya fenomena kebocoran ekonomi, di mana potensi nilai tambah yang seharusnya dapat meningkatkan pendapatan daerah justru keluar dari wilayah. Akibatnya, kontribusi subsektor kopi terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) menjadi tidak optimal, meskipun secara volume produksi tergolong tinggi. Selain itu, efek pengganda (multiplier effect) terhadap sektor-sektor lain seperti industri pengemasan, transportasi, perdagangan, dan jasa pendukung juga menjadi terbatas.

Lebih lanjut, ketergantungan pada penjualan bahan mentah menyebabkan petani kopi di Bengkulu berada pada posisi yang rentan terhadap fluktuasi harga global. Harga kopi yang ditentukan oleh pasar internasional seringkali bergejolak, sehingga berdampak langsung

terhadap pendapatan petani. Tanpa adanya diversifikasi produk dan peningkatan nilai tambah melalui hilirisasi, stabilitas ekonomi rumah tangga petani menjadi sulit untuk ditingkatkan secara signifikan.

Hilirisasi kopi menjadi instrumen strategis dalam menjawab permasalahan tersebut. Pengembangan industri pengolahan kopi, mulai dari proses roasting, grinding, blending, hingga produksi kopi kemasan siap konsumsi, dapat meningkatkan nilai ekonomi produk secara signifikan. Sebagai ilustrasi, harga kopi dalam bentuk green bean relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan kopi roasted atau kopi specialty yang telah memiliki branding dan standar kualitas tertentu. Selisih nilai tambah ini menjadi peluang ekonomi yang sangat besar apabila dapat dimanfaatkan di dalam daerah.

Selain peningkatan nilai ekonomi, hilirisasi juga berkontribusi terhadap penciptaan lapangan kerja baru, khususnya di sektor industri pengolahan dan jasa pendukung. Pengembangan industri kopi hilir akan mendorong tumbuhnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta meningkatkan keterlibatan generasi muda dalam sektor ekonomi kreatif berbasis kopi. Hal ini penting dalam mendukung transformasi struktur tenaga kerja dari sektor pertanian tradisional menuju sektor yang lebih produktif dan inovatif.

Dalam perspektif pembangunan wilayah, hilirisasi juga memiliki peran dalam memperkuat keterkaitan antar sektor (intersectoral linkage). Industri pengolahan kopi membutuhkan dukungan dari berbagai sektor lain seperti industri kemasan, logistik, pemasaran digital, serta pariwisata. Dengan demikian, hilirisasi dapat menjadi penggerak utama (leading sector) dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan terintegrasi.

Namun demikian, implementasi hilirisasi tidak dapat berjalan secara otomatis tanpa intervensi kebijakan yang tepat. Keterbatasan modal, teknologi, kapasitas sumber daya manusia, serta akses pasar menjadi kendala utama yang dihadapi oleh pelaku usaha lokal. Oleh karena itu, peran pemerintah daerah menjadi sangat penting dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan hilirisasi, baik melalui regulasi, fasilitasi, maupun insentif kebijakan.

Dalam kerangka kebijakan pembangunan daerah, hilirisasi kopi harus diposisikan sebagai strategi yang bersifat sistemik dan terintegrasi. Artinya, hilirisasi tidak hanya dilihat sebagai program sektoral dari satu perangkat daerah, tetapi sebagai agenda bersama lintas sektor yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, dunia usaha, lembaga keuangan, serta masyarakat.

Dengan demikian, hilirisasi komoditas kopi di Provinsi Bengkulu merupakan langkah strategis dalam mendorong transformasi ekonomi daerah dari berbasis komoditas primer menuju ekonomi berbasis nilai tambah. Transformasi ini diharapkan tidak hanya meningkatkan daya saing daerah, tetapi juga mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

Analisis Rantai Nilai Kopi sebagai Dasar Perumusan Intervensi

Teori rantai nilai (value chain theory) yang dikemukakan oleh Michael E. Porter (1985) menegaskan bahwa setiap tahapan dalam proses produksi memiliki kontribusi yang berbeda terhadap penciptaan nilai ekonomi. Rantai nilai tidak hanya menggambarkan alur produksi dari hulu ke hilir, tetapi juga menunjukkan distribusi margin keuntungan di setiap tahapan aktivitas ekonomi. Dalam konteks ini, aktivitas yang berada pada tahap hilir—seperti pengolahan

lanjutan, pengemasan, branding, dan pemasaran—cenderung menghasilkan nilai tambah yang lebih tinggi dibandingkan tahap hulu seperti budidaya dan panen.

Dalam komoditas kopi, struktur rantai nilai secara umum terdiri dari beberapa tahapan utama, yaitu: (1) budidaya dan panen oleh petani, (2) pengolahan primer (pengeringan dan sortasi), (3) perdagangan bahan mentah (green bean), (4) pengolahan sekunder seperti roasting dan grinding, (5) pengemasan dan branding, serta (6) distribusi dan pemasaran hingga ke konsumen akhir. Setiap tahapan tersebut memiliki karakteristik aktor, teknologi, serta tingkat margin keuntungan yang berbeda.

Berdasarkan kondisi eksisting di Provinsi Bengkulu, struktur rantai nilai kopi masih didominasi oleh aktivitas pada tahap hulu, yaitu budidaya dan pengolahan primer. Sebagian besar petani menjual kopi dalam bentuk biji kering (green bean) kepada pedagang pengumpul dengan harga yang relatif rendah. Tahap pengolahan lanjutan seperti roasting, pengemasan modern, serta pengembangan merek sebagian besar masih dilakukan di luar provinsi, terutama di daerah yang telah memiliki ekosistem industri kopi yang lebih maju.

Kondisi ini menyebabkan terjadinya ketimpangan distribusi nilai tambah di sepanjang rantai nilai kopi. Petani sebagai pelaku utama justru memperoleh porsi nilai ekonomi yang relatif kecil, sementara pelaku usaha pada tahap hilir memperoleh margin keuntungan yang lebih besar. Dalam perspektif ekonomi regional, fenomena ini dikenal sebagai kebocoran nilai tambah, di mana sebagian besar potensi ekonomi daerah tidak terakumulasi di wilayah asal produksi.

Secara ilustratif, harga kopi dalam bentuk green bean dapat berkisar pada tingkat tertentu, namun setelah melalui proses roasting, pengemasan, dan branding, nilai jualnya dapat meningkat berkali lipat di pasar ritel. Selisih nilai tersebut mencerminkan besarnya potensi ekonomi yang hilang apabila daerah tidak mengembangkan industri hilir secara mandiri. Dengan demikian, tanpa intervensi kebijakan yang tepat, Provinsi Bengkulu akan tetap berada pada posisi sebagai pemasok bahan mentah dalam rantai nilai global.

Lebih lanjut, analisis rantai nilai juga menunjukkan adanya kelemahan pada aspek integrasi antar pelaku. Hubungan antara petani, pedagang, koperasi, dan pelaku industri masih bersifat fragmentatif dan belum terintegrasi secara optimal. Petani umumnya memiliki akses terbatas terhadap informasi pasar, teknologi pengolahan, serta pembiayaan, sehingga posisi tawarnya dalam rantai nilai menjadi lemah. Di sisi lain, pelaku usaha pengolahan juga menghadapi kendala dalam memperoleh bahan baku berkualitas secara konsisten.

Pendekatan rantai nilai menekankan bahwa peningkatan nilai tambah tidak dapat dicapai hanya melalui peningkatan produksi, tetapi harus diiringi dengan penguatan keterkaitan (linkages) antar tahapan produksi. Dalam hal ini, terdapat dua bentuk keterkaitan yang penting, yaitu integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Integrasi vertikal mengacu pada penguatan hubungan antara pelaku di sepanjang rantai nilai (petani–koperasi–industri), sedangkan integrasi horizontal mengacu pada penguatan kelembagaan di tingkat pelaku yang sama, seperti pembentukan koperasi atau kelompok usaha bersama.

Dalam konteks kebijakan daerah, pemerintah memiliki peran strategis dalam memperkuat integrasi tersebut. Intervensi dapat dilakukan melalui penguatan kelembagaan petani, fasilitasi kemitraan usaha antara petani dan industri pengolahan, serta penyediaan infrastruktur pendukung seperti rumah produksi bersama (shared processing facility). Selain itu, pengembangan sistem logistik yang efisien juga menjadi faktor penting dalam menurunkan

biaya distribusi dan meningkatkan daya saing produk.

Aspek lain yang tidak kalah penting dalam rantai nilai adalah standarisasi mutu dan sertifikasi produk. Dalam pasar kopi modern, terutama pada segmen specialty coffee dan ekspor, kualitas produk menjadi faktor penentu utama daya saing. Sertifikasi seperti standar mutu nasional (SNI), sertifikasi organik, hingga Indikasi Geografis (IG) dapat meningkatkan nilai jual produk sekaligus memperkuat identitas kopi Bengkulu di pasar. Tanpa adanya standar kualitas yang konsisten, produk kopi akan sulit bersaing di pasar premium yang memiliki nilai tambah tinggi.

Selain itu, perkembangan teknologi digital juga membuka peluang baru dalam penguatan rantai nilai kopi. Platform pemasaran digital, e-commerce, serta sistem informasi pasar dapat dimanfaatkan untuk memperpendek rantai distribusi dan meningkatkan akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Digitalisasi juga memungkinkan transparansi harga yang lebih baik sehingga posisi tawar petani dapat meningkat.

Dari perspektif kebijakan publik, analisis rantai nilai memberikan dasar yang kuat dalam menentukan titik intervensi yang paling efektif. Intervensi kebijakan sebaiknya difokuskan pada titik-titik kritis yang memiliki potensi penciptaan nilai tambah tertinggi, yaitu pada tahap pengolahan lanjutan, pengemasan, dan pemasaran. Selain itu, intervensi juga perlu diarahkan untuk memperbaiki kegagalan pasar (market failure), seperti keterbatasan akses pembiayaan, asimetri informasi, serta lemahnya koordinasi antar pelaku.

Dengan demikian, analisis rantai nilai tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memahami struktur ekonomi komoditas kopi, tetapi juga sebagai dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran. Solusi terhadap rendahnya nilai tambah kopi Bengkulu harus mencakup intervensi yang komprehensif dan terintegrasi, mulai dari penguatan hulu hingga pengembangan hilir, dengan fokus pada penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan.

Peningkatan Nilai Tambah sebagai Strategi Penguatan Ekonomi Lokal

Nilai tambah dalam konteks agroindustri merupakan peningkatan nilai ekonomi suatu komoditas yang terjadi akibat proses transformasi, baik secara fisik maupun nonfisik. Transformasi fisik mencakup kegiatan pengolahan seperti pengeringan, roasting, penggilingan, hingga pengemasan, sedangkan transformasi nonfisik meliputi peningkatan kualitas, diferensiasi produk, sertifikasi, branding, serta penguatan akses pasar. Dalam kerangka teori ekonomi, nilai tambah menjadi indikator penting dalam mengukur tingkat produktivitas dan efisiensi suatu sistem produksi, serta menjadi salah satu determinan utama dalam peningkatan pendapatan masyarakat.

Dalam komoditas kopi, penciptaan nilai tambah memiliki spektrum yang luas dan bertingkat. Pada tahap paling dasar, nilai tambah diperoleh dari proses pengolahan primer seperti pengeringan dan sortasi. Namun, nilai tambah yang lebih signifikan justru berada pada tahap pengolahan lanjutan seperti roasting, blending, dan produksi kopi siap konsumsi. Selain itu, aspek nonfisik seperti pengembangan merek, storytelling produk, sertifikasi organik, serta Indikasi Geografis (IG) juga berperan besar dalam meningkatkan nilai jual produk di pasar, khususnya pada segmen specialty coffee.

Secara ilustratif, harga kopi dalam bentuk biji mentah (green bean) relatif jauh lebih rendah dibandingkan dengan kopi yang telah melalui proses roasting dan dikemas secara premium. Dalam beberapa kasus, nilai jual kopi dapat meningkat hingga dua hingga lima kali

lipat setelah melalui proses hilirisasi yang tepat. Selisih nilai tersebut mencerminkan besarnya potensi ekonomi yang dapat diciptakan melalui strategi peningkatan nilai tambah di dalam daerah.

Dalam perspektif makroekonomi, peningkatan nilai tambah memiliki implikasi yang luas terhadap perekonomian daerah. Pertama, peningkatan nilai tambah akan berdampak langsung terhadap peningkatan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), khususnya pada sektor industri pengolahan. Kedua, pengembangan industri hilir akan menciptakan lapangan kerja baru yang lebih beragam, tidak hanya di sektor pertanian, tetapi juga di sektor industri, perdagangan, dan jasa. Ketiga, peningkatan nilai tambah akan memperkuat struktur ekonomi daerah dengan mengurangi ketergantungan pada sektor primer yang rentan terhadap fluktuasi harga.

Selain itu, peningkatan nilai tambah juga memiliki efek pengganda (*multiplier effect*) yang signifikan terhadap sektor-sektor lain. Pengembangan industri pengolahan kopi akan mendorong pertumbuhan sektor pendukung seperti industri kemasan, logistik, transportasi, pemasaran digital, serta pariwisata berbasis kopi (*coffee tourism*). Dengan demikian, hilirisasi kopi tidak hanya berdampak pada peningkatan pendapatan petani, tetapi juga mampu menciptakan ekosistem ekonomi lokal yang lebih dinamis dan terintegrasi.

Namun demikian, dalam praktiknya, penciptaan nilai tambah tidak selalu terjadi secara otomatis melalui mekanisme pasar. Terdapat berbagai hambatan struktural yang dihadapi oleh pelaku usaha lokal, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Keterbatasan akses terhadap modal usaha, teknologi pengolahan, serta kapasitas manajerial menjadi faktor utama yang menghambat proses transformasi dari usaha berbasis produksi primer menuju industri pengolahan bernilai tambah tinggi.

Selain itu, keterbatasan akses terhadap pasar juga menjadi tantangan yang signifikan. Produk kopi olahan dari daerah seringkali kesulitan bersaing dengan produk dari daerah lain yang telah memiliki branding kuat dan jaringan distribusi yang luas. Di sisi lain, standar kualitas yang belum seragam serta belum optimalnya sertifikasi produk juga menjadi kendala dalam memasuki pasar premium maupun ekspor.

Dalam perspektif kebijakan publik, kondisi tersebut mencerminkan adanya kegagalan pasar (*market failure*) yang memerlukan intervensi pemerintah. Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem yang kondusif bagi pengembangan nilai tambah melalui berbagai instrumen kebijakan. Intervensi tersebut dapat mencakup penyediaan infrastruktur pengolahan seperti rumah produksi bersama, fasilitasi akses pembiayaan melalui skema kredit usaha rakyat (KUR), serta pelatihan dan pendampingan bagi pelaku usaha.

Selain itu, pemerintah juga dapat berperan dalam mendorong standarisasi dan sertifikasi produk, seperti Standar Nasional Indonesia (SNI), sertifikasi halal, serta Indikasi Geografis (IG). Sertifikasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas produk, tetapi juga memberikan jaminan kepada konsumen serta meningkatkan daya saing produk di pasar. Dalam konteks kopi Bengkulu, penguatan identitas produk melalui Indikasi Geografis dapat menjadi strategi penting dalam membedakan produk di pasar nasional maupun internasional.

Strategi peningkatan nilai tambah juga harus diarahkan pada pengembangan produk yang berorientasi pasar. Dalam beberapa tahun terakhir, tren konsumsi kopi menunjukkan pergeseran ke arah produk *specialty coffee* dan kopi premium yang memiliki karakteristik rasa yang unik serta cerita asal-usul (*origin story*) yang kuat. Hal ini menjadi peluang bagi Bengkulu

untuk mengembangkan produk kopi dengan diferensiasi yang berbasis pada keunggulan lokal, baik dari aspek geografis maupun budaya.

Lebih lanjut, pemanfaatan teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan nilai tambah. Platform e-commerce, media sosial, serta digital marketing dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses pasar dan meningkatkan visibilitas produk kopi Bengkulu. Digitalisasi juga memungkinkan pelaku usaha untuk menjangkau konsumen secara langsung tanpa melalui rantai distribusi yang panjang, sehingga margin keuntungan dapat lebih optimal.

Dalam konteks perencanaan pembangunan daerah, strategi peningkatan nilai tambah kopi Bengkulu harus diselaraskan dengan arah kebijakan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029, yang menekankan transformasi ekonomi berbasis hilirisasi. Hal ini berarti bahwa pengembangan industri kopi tidak hanya menjadi tanggung jawab satu sektor, tetapi harus melibatkan berbagai perangkat daerah secara terintegrasi, termasuk sektor pertanian, perindustrian, perdagangan, koperasi, dan pariwisata.

Dengan demikian, peningkatan nilai tambah bukan hanya merupakan tujuan ekonomi semata, tetapi juga merupakan instrumen strategis dalam mendorong transformasi ekonomi daerah. Melalui pengembangan hilirisasi kopi yang terintegrasi dan berbasis pada keunggulan lokal, Provinsi Bengkulu memiliki peluang besar untuk meningkatkan daya saing, memperkuat struktur ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Analisis Daya Saing Kopi Bengkulu

Daya saing daerah merupakan kemampuan suatu wilayah dalam menghasilkan barang dan jasa yang mampu bersaing di pasar, baik domestik maupun internasional, sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam perspektif ekonomi regional, daya saing tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sumber daya alam, tetapi juga oleh kemampuan daerah dalam mengelola, mengolah, dan memasarkan sumber daya tersebut secara efektif dan efisien.

Salah satu pendekatan yang paling banyak digunakan dalam menganalisis daya saing adalah model Diamond of Competitive Advantage yang dikembangkan oleh Michael E. Porter. Model ini menjelaskan bahwa daya saing suatu wilayah ditentukan oleh empat komponen utama, yaitu: (1) kondisi faktor produksi (factor conditions), (2) kondisi permintaan (demand conditions), (3) industri pendukung dan terkait (related and supporting industries), serta (4) strategi, struktur, dan persaingan perusahaan (firm strategy, structure, and rivalry). Keempat faktor ini saling berinteraksi dan membentuk sistem yang menentukan tingkat daya saing suatu komoditas.

1. Kondisi Faktor Produksi (Factor Conditions)

Kopi Bengkulu memiliki keunggulan komparatif yang cukup kuat dari sisi faktor produksi. Luas areal perkebunan yang mencapai sekitar 90 ribu hektare serta jumlah petani yang besar menunjukkan ketersediaan sumber daya alam dan tenaga kerja yang melimpah. Selain itu, kondisi agroklimat di wilayah dataran tinggi Bengkulu sangat mendukung budidaya kopi robusta dengan karakteristik cita rasa yang khas.

Namun demikian, keunggulan tersebut masih bersifat komparatif dan belum sepenuhnya berkembang menjadi keunggulan kompetitif. Produktivitas kopi Bengkulu yang relatif masih rendah dibandingkan daerah lain menunjukkan adanya keterbatasan

dalam penerapan teknologi budidaya, penggunaan bibit unggul, serta praktik pascapanen. Selain itu, kualitas sumber daya manusia, khususnya dalam aspek pengolahan dan manajemen usaha, masih perlu ditingkatkan agar mampu mendukung pengembangan industri hilir.

2. Kondisi Permintaan (Demand Conditions)

Dari sisi permintaan, tren pasar kopi baik di tingkat nasional maupun global menunjukkan peningkatan yang signifikan, terutama pada segmen kopi premium dan specialty coffee. Konsumen saat ini tidak hanya mempertimbangkan harga, tetapi juga kualitas, cita rasa, serta cerita asal-usul produk (origin-based product). Hal ini membuka peluang besar bagi kopi Bengkulu untuk masuk ke pasar bernilai tambah tinggi.

Namun demikian, permintaan terhadap kopi Bengkulu secara spesifik masih relatif terbatas dibandingkan daerah lain yang telah memiliki branding kuat seperti Gayo atau Toraja. Hal ini menunjukkan bahwa permintaan terhadap kopi Bengkulu masih bersifat umum dan belum terdiferensiasi secara jelas. Kondisi ini menjadi tantangan sekaligus peluang bagi pemerintah daerah untuk mendorong penciptaan identitas produk yang lebih kuat melalui strategi branding dan sertifikasi.

3. Industri Pendukung dan Terkait (Related and Supporting Industries)

Keberadaan industri pendukung merupakan faktor penting dalam meningkatkan daya saing suatu komoditas. Dalam konteks kopi Bengkulu, industri pendukung seperti pengolahan, pengemasan, logistik, serta pemasaran masih belum berkembang secara optimal. Keterbatasan fasilitas pengolahan modern serta minimnya industri roasting skala menengah dan besar menjadi hambatan utama dalam pengembangan hilirisasi.

Selain itu, ekosistem usaha yang mendukung seperti lembaga pembiayaan, lembaga riset, serta jaringan distribusi juga masih perlu diperkuat. Tanpa adanya dukungan dari industri terkait, upaya peningkatan nilai tambah akan sulit dicapai secara optimal. Oleh karena itu, pengembangan klaster industri kopi menjadi salah satu strategi yang relevan untuk memperkuat keterkaitan antar sektor dan meningkatkan efisiensi produksi.

4. Strategi, Struktur, dan Persaingan Usaha (Firm Strategy, Structure, and Rivalry)

Dari sisi strategi dan struktur usaha, sebagian besar pelaku usaha kopi di Bengkulu masih berada pada skala mikro dan kecil dengan orientasi produksi yang terbatas. Inovasi produk, pengembangan merek, serta strategi pemasaran masih belum menjadi fokus utama. Hal ini menyebabkan daya saing produk kopi Bengkulu di pasar menjadi relatif lemah dibandingkan dengan produk dari daerah lain yang telah memiliki diferensiasi yang jelas.

Persaingan di pasar kopi, baik domestik maupun global, semakin ketat dengan munculnya berbagai produk kopi dari daerah lain yang telah mengembangkan branding dan sertifikasi secara kuat. Tanpa strategi yang tepat, kopi Bengkulu berpotensi tertinggal dalam kompetisi tersebut. Oleh karena itu, diperlukan transformasi strategi usaha dari sekadar produksi menjadi berorientasi pada nilai tambah dan pasar.

Pendekatan Klaster Industri dalam Hilirisasi

Pendekatan klaster industri menekankan pentingnya konsentrasi geografis pelaku usaha

yang saling terkait untuk menciptakan efisiensi dan inovasi. Klaster kopi yang terintegrasi dapat meningkatkan produktivitas melalui kemudahan akses bahan baku, berbagi teknologi, serta kolaborasi dalam pemasaran.

Dalam konteks Bengkulu, sentra produksi kopi seperti Rejang Lebong dan Kepahiang memiliki potensi untuk dikembangkan menjadi klaster industri kopi yang terintegrasi. Pembentukan klaster memungkinkan sinergi antara petani, koperasi, industri pengolahan, lembaga pembiayaan, dan lembaga penelitian. Dengan adanya koordinasi yang lebih baik, proses hilirisasi dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

Pendekatan klaster juga memberikan kemudahan bagi pemerintah daerah dalam memfokuskan dukungan kebijakan pada wilayah tertentu sehingga dampaknya lebih terukur.

Peran Pemerintah dalam Mendorong Hilirisasi

Dalam teori kebijakan publik, intervensi pemerintah diperlukan ketika terjadi kegagalan pasar atau ketidaksempurnaan informasi yang menghambat efisiensi ekonomi. Hilirisasi kopi menghadapi berbagai hambatan struktural seperti keterbatasan pembiayaan, rendahnya investasi, serta lemahnya koordinasi antar pelaku.

Pemerintah daerah memiliki peran sebagai regulator, fasilitator, dan katalisator. Sebagai regulator, pemerintah dapat menetapkan kebijakan yang memberikan insentif bagi industri pengolahan kopi. Sebagai fasilitator, pemerintah dapat menyediakan dukungan pelatihan, sertifikasi, dan akses pembiayaan. Sebagai katalisator, pemerintah dapat mendorong kemitraan antara petani dan industri melalui skema kerja sama yang saling menguntungkan.

Intervensi kebijakan yang dirancang harus mempertimbangkan efektivitas, efisiensi, serta kelayakan implementasi agar mampu menjawab problem statement secara langsung.

Sintesis Analisis

Berdasarkan tinjauan konseptual dan analisis teoretis di atas, dapat disimpulkan bahwa peningkatan nilai tambah dan daya saing kopi Bengkulu memerlukan strategi hilirisasi yang terintegrasi dan berbasis penguatan rantai nilai. Transformasi struktural dari ekonomi berbasis bahan mentah menuju ekonomi berbasis industri pengolahan menjadi kunci untuk mengatasi rendahnya kontribusi kopi terhadap perekonomian daerah.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis, dapat disimpulkan bahwa komoditas kopi di Provinsi Bengkulu memiliki potensi besar sebagai penggerak ekonomi daerah, namun belum mampu memberikan nilai tambah optimal karena masih didominasi oleh aktivitas hulu. Struktur rantai nilai yang belum terintegrasi, keterbatasan industri pengolahan, serta lemahnya branding menjadi faktor utama rendahnya daya saing kopi Bengkulu. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya kebocoran nilai tambah, di mana sebagian besar keuntungan ekonomi dinikmati oleh pelaku usaha di luar daerah.

Lebih lanjut, hasil evaluasi kebijakan menunjukkan bahwa pengembangan klaster industri kopi terintegrasi merupakan strategi paling efektif untuk mendorong hilirisasi. Pendekatan ini mampu memperkuat keterkaitan antar pelaku, meningkatkan kapasitas produksi dan pengolahan, serta menciptakan nilai tambah yang lebih merata. Oleh karena itu, diperlukan dukungan kebijakan yang komprehensif melalui penguatan kelembagaan, peningkatan

kapasitas sumber daya manusia, akses pembiayaan, serta pengembangan branding produk agar transformasi ekonomi berbasis kopi di Provinsi Bengkulu dapat berjalan secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Bengkulu, B. P. S. P. (2023). *Statistik Perkebunan Provinsi Bengkulu*. BPS Provinsi Bengkulu.
- Bengkulu, D. P. P. (2024). *Data Produksi dan Luas Areal Kopi Provinsi Bengkulu*.
- Bravo-Monroy, L., Potts, S. G., & Tzanopoulos, J. (2016). Drivers Influencing Farmer Decisions for Adopting Organic or Conventional Coffee Management Practices. *Food Policy*, 58, 49–61. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.11.003>
- Dunn, W. N. (2018). *Public Policy Analysis: An Integrated Approach* (6th ed.). Routledge.
- Gereffi, G., Humphrey, J., & Sturgeon, T. (2005). The Governance of Global Value Chains. *Review of International Political Economy*, 12(1), 78–104. <https://doi.org/10.1080/09692290500049805>
- Humphrey, J., & Schmitz, H. (2002). How Does Insertion in Global Value Chains Affect Upgrading in Industrial Clusters? *Regional Studies*, 36(9), 1017–1027. <https://doi.org/10.1080/0034340022000022198>
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029, (2025).
- Indonesia, K. P. R. (2023). *Statistik Perkebunan Indonesia: Kopi*.
- Jurjonas, M., Crossman, K., Solomon, J., & Baez, W. L. (2016). Potential Links Between Certified Organic Coffee and Deforestation in a Protected Area in Chiapas, Mexico. *World Development*, 78, 13–21. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.10.030>
- Minten, B., Dereje, M., Engida, E., & Tamru, S. (2018). Tracking the Quality Premium of Certified Coffee: Evidence from Ethiopia. *World Development*, 101, 119–132. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.08.010>
- Minten, B., Dereje, M., Engida, E., & Tamru, S. (2019). Coffee Value Chains on the Move: Evidence from Ethiopia. *Food Policy*, 83, 370–383. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2017.07.012>
- Nasional, B. P. P. (2021). *Kajian Hilirisasi Komoditas Pertanian dalam Rangka Transformasi Ekonomi*. Kementerian PPN/Bappenas.
- Ola, O., & Menapace, L. (2020a). A Meta-Analysis Understanding Smallholder Entry into High-Value Markets. *World Development*, 135, 105079. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2020.105079>
- Ola, O., & Menapace, L. (2020b). Smallholders' Perceptions and Preferences for Market Attributes Promoting Sustained Participation in Modern Agricultural Value Chains. *Food Policy*, 97, 101962. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2020.101962>
- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu tentang RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025–2029. (n.d.).
- Swinnen, J., & Kuijpers, R. (2019). Value Chain Innovations for Technology Transfer in Developing and Emerging Economies: Conceptual Issues, Typology, and Policy Implications. *Food Policy*, 83, 298–309. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2018.08.004>
- Tabe-Ojong, M. P., Nana, I., Zimmermann, A., & Jafari, Y. (2024). Trends and Evolution of Global Value Chains in Food and Agriculture: Implications for Food Security and Nutrition. *Food Policy*, 127, 102679. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2024.102679>
- van Rijsbergen, B., Elbers, W., Ruben, R., & Njuguna, S. N. (2016). The Ambivalent Impact of Coffee Certification on Farmers' Welfare: A Matched Panel Approach for Cooperatives in Central Kenya. *World Development*, 77, 277–292. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2015.08.021>
- Vellema, W., Buritica Casanova, A., Gonzalez, C., & D'Haese, M. (2015). The Effect of

- Specialty Coffee Certification on Household Livelihood Strategies and Specialisation.
Food Policy, 57, 13–25. <https://doi.org/10.1016/j.foodpol.2015.07.003>
- Vicol, M., Neilson, J., Hartatri, D. F. S., & Cooper, P. (2018). Upgrading for Whom? Relationship Coffee, Value Chain Interventions and Rural Development in Indonesia.
World Development, 110, 26–37. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2018.05.020>